

**KEBANGKITAN LOKAL MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASI :
REVITALISASI NILAI-NILAI BUDAYA SUNDA
BAGI PENCIPTAAN *LOCAL GOOD GOVERNANCE* DI JAWA BARAT**

oleh:

*Dede Mariana * dan Caroline Paskarina ***

Abstract

In Indonesia, decentralization appeared to be a compromistic choice to ensure acknowledgment toward ethnics pluralism and geographical differences among regions in Indonesia. Democratization and globalization ideas brought changes in broader aspects, including in the view of existence and power of nation-state. The two concepts could implicate a cultural conflict, between new cultural values from global society and old cultural values from local society. In this case, it is interesting to analyze how far the implication could effect the implementation of local autonomy, is globalization a supporting factor for political pluralism and local culture or in the contrary, a thread for them?

Keywords: globalization, glocalization, local good governance

Dalam kasus Indonesia, penerapan otonomi daerah sebenarnya merupakan pilihan kompromistis yang sarat dengan nuansa politis. Mengingat keanekaragaman etnis dan kondisi geografis daerah-daerah di Indonesia, desentralisasi tampaknya menjadi pilihan yang mampu menjamin pengakuan terhadap keragaman tersebut. Secara historis, kebijakan desentralisasi sebagai prinsip yang mendasari otonomi daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kekuasaan. Pada masa Hindia Belanda, misalnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah lebih berfokus pada pencapaian efisiensi dalam hubungan pusat dan daerah. Demikian pula pada masa-masa selanjutnya, fokus

* Kapuslit KP2W Lemlit Unpad, Dosen FISIP Universitas Padjadjaran Bandung

** Staf Peneliti Bidang Politik Lokal Puslit KP2W Lemlit Unpad, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM Bandung

pada efisiensi dan peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi sangat mewarnai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Baru pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi, pola hubungan pusat dan daerah mulai bergeser ke arah pengakuan pluralisme politik.

Gagasan demokratisasi yang kini berhembus kencang di seluruh penjuru dunia juga masuk ke Indonesia melalui apa yang disebut dengan sistem global dalam berbagai dimensinya (politik, ekonomi, teknologi, dan kultural). Saling keterkaitan antara dimensi-dimensi tersebut turut menyebabkan terjadinya sejumlah pergeseran, termasuk dalam memandang eksistensi dan kekuasaan negara-bangsa. Secara khusus, apresiasi terhadap *localism* (hal-hal yang bersifat lokal) mempunyai implikasi yang sangat penting bagi berkembangnya politik desentralisasi dan otonomi daerah. Globalisasi dan demokratisasi dapat menciptakan implikasi dalam bentuk konflik-konflik budaya, antara lain dalam bentuk ketegangan antarnilai-nilai budaya baru yang datang dari masyarakat global (seperti konsumerisme, gaya hidup, cara berpikir, dll) dengan budaya lama atau budaya lokal yang berbeda dengan budaya global dari sisi asumsi, ekspresi, atau organisasi sosial budaya tersebut.

Oleh karenanya, perlu dikaji seberapa jauh implikasi tersebut bagi penerapan otonomi daerah, apakah globalisasi menjadi faktor pendukung bagi pengakuan pluralisme politik dan budaya lokal atau sebaliknya menjadi ancaman yang dapat membangkitkan disintegrasi nasional ? Apakah dengan otonomi daerah, daerah akan mampu menghadapi pemodal dan pemain global atau justru sebaliknya globalisasi memberi peluang kepada daerah untuk mengakses pasar global ? Dengan kondisi empirik sekarang ini di mana kualitas sumber daya manusia Indonesia masih ditandai dengan disparitas (kesenjangan)

yang cukup tinggi dalam tingkat sosial-ekonominya, serta kondisi pemerintahan yang sarat dengan sejumlah penyimpangan, globalisasi menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan strategi yang matang agar tidak semakin menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang ketergantungan global.

Melacak Akar Historis Globalisasi

Globalisasi merupakan isu paling fenomenal sepanjang akhir abad 20 karena kemunculannya menuai beragam respon, mulai dari yang secara ekstrem menentangnya sampai pada kelompok di titik ekstrem lain yang mendukungnya dan memandangnya sebagai suatu keniscayaan. Secara historis, sebenarnya globalisasi bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum kemunculan *nation state*, perdagangan dan migrasi lintas benua sebagai cikal bakal globalisasi telah sejak lama berlangsung. Globalisasi dalam pengertian modern muncul pada periode Perang Dunia sebagai kulminasi dari ekspansi imperialisme¹. Pada masa itu, paling tidak beberapa kawasan dunia di bawah supremasi Eropa, melakukan kontak satu sama lain dalam bidang militer, politik, ekonomi, dan budaya.

Namun sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia, gelombang globalisasi juga mengalami pasang surut. Salah satu kekuatan yang melatarbelakanginya adalah tarik-menarik antara paham internasionalis dengan nasionalis atau isolasionis². Paham internasionalis menghendaki diterapkannya politik pintu terbuka dalam hubungan luar negeri antarnegara, sebaliknya, paham isolasionis menghendaki agar hubungan luar

¹ Ian Clark. 1997. *Globalization and Fragmentation : International Relations in the Twentieth Century*. Oxford & London : Oxford University Press, hal. 36 – 51.

² Lawrence B. Lindsey. “The Real Economic Globalist” dalam *Far Eastern Economic Review*, 26 Maret 1998, hal. 32.

negeri dibatasi demi menjaga eksistensi nilai-nilai nasional suatu bangsa. Perdebatan di antara kedua paham ini semakin mengerucut selama periode Perang Dingin yang membagi dunia ke dalam dua blok, yakni Blok Barat yang pro-internasionalis dan Blok Timur yang pro-isolasionis.

Gelombang globalisasi pada dekade tahun 1980-an jauh berbeda dari segi intensitas dan cakupannya. Globalisasi praktis telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, yang tidak hanya di segala bidang (ekonomi, budaya, politik, dan ideologi) melainkan juga ke tataran sistem, proses, pelaku, dan peristiwa. Globalisasi menjadi suatu fenomena terintegrasinya dunia melalui peningkatan aliran modal, barang, jasa, ide, dan orang melalui batas-batas internasional. Konsekuensi dari terintegrasinya dunia adalah hal-hal yang terjadi di suatu tempat akan mempengaruhi tempat lainnya. Misalnya jatuhnya nilai tukar mata uang Baht pada tahun 1997 di Thailand ternyata berdampak terhadap krisis finansial di Indonesia pada tahun yang sama.

Akan tetapi proses globalisasi ini tidak selalu berjalan mulus karena cenderung diwarnai oleh berbagai fragmentasi. Pada satu sisi, globalisasi mengandung elemen-elemen integrasi, saling ketergantungan, multilateralisme, keterbukaan, dan penetrasi satu sama lain. Sementara di sisi lain, elemen-elemen dari fragmentasi seperti disintegrasi, autarkhi, unilateralisme, menutup diri, dan isolasi juga turut menguat. Globalisasi mengarah pada globalisme (*globalism*), penyempitan wilayah (*spatial compression*), universalisme (*universalism*), homogenitas (*homogeneity*), dan konvergensi (*convergency*). Sementara fragmentasi mengarah pada nasionalisme atau regionalisme, pelebaran wilayah, separatisme, heterogenitas, dan divergensi. Kondisi yang paradoks inilah yang kemudian memunculkan sikap pro dan kontra terhadap globalisasi.

Kekhawatiran muncul karena tidak semua negara memiliki daya tahan yang tangguh untuk terlibat di dalam lalu lintas finansial global yang tidak lagi mengenal batas-batas negara dan semakin sulit dikontrol oleh pemerintah negara yang berdaulat, termasuk negara-negara maju dan terlebih lagi negara-negara berkembang. Persoalan besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan dunia internasional untuk meliberalisasikan perekonomiannya adalah biaya sosial dan politik yang terjadi sebagai akibat terbukanya pasar barang dan pasar finansial. Liberalisasi barang dan jasa serta modal membuat posisi pekerja dan serikat pekerja kian lemah. Di lain pihak, tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*) tidak bebas berpindah ke negara-negara yang tingkat upah rata-ratanya lebih tinggi. Jadi, liberalisasi yang terjadi lebih bersifat searah yang merugikan kepentingan negara-negara berkembang. Hal ini membuat beban sosial yang diemban negara-negara berkembang semakin besar, padahal kemampuan mereka untuk membentuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) sangatlah terbatas.

Glokalisasi : Memadukan Dua Kepentingan

Dewasa ini, globalisasi menjadi suatu gerakan di mana manusia menjadi semakin terintegrasi, tidak hanya dalam hal pasar dan produksi, tetapi juga melalui komunikasi dan transportasi. Namun, pada praktiknya, integrasi ini justru memunculkan paradoks, yakni terbentuknya sebuah masyarakat homogen. Teknologi komunikasi dan informasi cenderung mendorong proses global homogenisasi dan internalisasi budaya dan bukannya menciptakan integrasi budaya global yang kaya akan keanekaragaman³.

³ Samsurizal Panggabean. "Tantangan-tantangan Globalisasi". *Perspektif*, Nomor 1, Volume 3, 1991.

Pendorong arus globalisasi adalah negara-negara maju, kapitalis, negara Barat, didukung dengan keperkasaan teknologi, ketersediaan dana, dan kelengkapan jaringan media informasinya. Dalam perkembangannya, ternyata globalisasi budaya modernitas yang dibawa oleh negara-negara industri adidaya ternyata menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Globalisasi budaya modernitas membawa perubahan terhadap pemaknaan sistem nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat di negara-negara berkembang, sehingga mengarah pada berkembangnya sistem sosial baru yang bisa jadi sangat berlainan dengan budaya lokal masyarakat suatu negara.

Dalam konteks ini, globalisasi akan mempertanyakan otonomi dan kedaulatan negara, sehingga nasib suatu negara akan sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan global dan lokal dalam berinteraksi satu sama lain. Karena itu, pada era globalisasi negara seringkali menghadapi masalah loyalitas masyarakat yang menyebar ke arah globalisasi dan subnasional, sehingga kegagalan dalam pemisahan kedua loyalitas tersebut akan memicu terjadinya konflik antarmasyarakat, antaretnis, atau antarbudaya⁴.

Jika diamati, dalam masyarakat Indonesia terjadi pertemuan antara globalisasi (universalisme) dan lokalisasi (partikularisme). Pertemuan di antara dua kutub yang sangat berbeda bahkan berada di ujung yang paling ekstrem memicu kontradiksi budaya, yang dapat dilihat dari 2 (dua) sisi⁵, yakni *pertama*, sebelum masuk ke Indonesia, budaya kapitalisme modernitas memiliki prinsip budaya kapitalisme modern yang sangat menjunjung tinggi prinsip rasionalitas, efisiensi, produktivitas, dan egaliter dengan sistem

⁴ Anak Agung Banyu Perwita. "Konflik Antar Etnis dalam Masyarakat Global dan Relevansinya bagi Indonesia". *Analisis CSIS*, No. 2, 1996.

⁵ Lambang Triyono. "Globalisasi Modernitas dan Krisis Negara Bangsa : Tantangan Integrasi Nasional dalam Konteks Global", *Analisis CSIS*, Nomor 2, 1996.

budayanya yang berekspresi sangat hedonistik, materialistik, dan pemuasan individual. *Kedua*, sebaliknya sebelum bertemu dengan budaya kapitalisme modern, budaya agraris Indonesia memiliki prinsip sendiri yang sangat berbeda dengan prinsip budaya modern. Dalam budaya Indonesia, terdapat sistem feodalisme dan komunalisme yang masih menjunjung tinggi prinsip mistis, magis, ritual yang tidak membebaskan dan tidak mendorong emansipasi warga.

Perbedaan karakteristik kultural ini kemudian memunculkan kontradiksi budaya, di mana dalam satu sisi terdapat keinginan untuk memberlakukan prinsip-prinsip kapitalisme modern, sementara di sisi lain, prinsip hubungan sosial politik feodal dan komunalisme masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Bertemunya kedua kutub globalisasi dan lokalisasi tidak secara otomatis mendorong masyarakat lokal meninggalkan corak tradisionalnya menuju budaya modern, tetapi terjadi saling tumpang tindih antarkeduanya.

Kondisi yang kontradiktif inilah yang kemudian mendorong berkembangnya pemikiran untuk mencari alternatif yang dapat memadukan dua kepentingan, yakni kepentingan akumulasi kapital di ranah global dan kepentingan memberdayakan potensi-potensi lokal untuk mencegah ketergantungan lokal terhadap kekuatan global.

Dalam studinya tentang berbagai respon budaya lokal terhadap budaya modernitas yang merupakan salah satu implikasi dari globalisasi, Dogan⁶ mengemukakan 5 (lima) macam respon budaya, yakni :

⁶ Hasan Zafer Dogan. "Form of Adjustment : Sociocultural Impacts of Tourism", *Annual of Tourism Research* Volume 16, 1989.

1. Respon penolakan (*resistance*), terjadi ketika budaya modernitas dipandang merusak struktur dan kultur masyarakat lokal, tetapi masyarakat tidak mempunyai kekuatan atau tidak berdaya menolaknya.
2. Respon kebangkitan (*revivalization*), terjadi ketika sebagian besar masyarakat menolak dan membangkitkan budaya lokal sebagai kekuatan untuk melawan modernitas.
3. Respon menjaga batas-batas (*maintenance boundaries*), terjadi ketika masyarakat menerima sebagian tetapi menolak sebagian yang lain dan membiarkan keduanya hidup berdampingan secara damai.
4. Respon pemulihan kembali (*revitalization*) budaya lokal, terjadi ketika masyarakat menerima modernitas dan menjadikannya sebagai sarana untuk memulihkan budaya lokal yang telah hancur oleh modernisasi. Respon penerimaan (*adoption*) budaya modernitas sepenuhnya. Respon inilah yang bersifat paling terbuka menerima sepenuhnya budaya modernitas. Dalam jenis respon ini, budaya lokal tidak memiliki hambatan sosial kultural untuk menerima budaya modernitas.

Jalan tengah yang muncul sebagai hasil sintesis antara kepentingan global untuk memperluas pengaruhnya dan kepentingan lokal untuk mempertahankan eksistensinya melahirkan konsep glocalisasi (*glocalization*). Konsep ini menjadi varian dari respon pemulihan kembali budaya lokal sambil berupaya melakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap nilai-nilai global yang dipandang berdampak negatif terhadap kondisi lokal bahkan nasional.

Pada awal kemunculannya, glocalisasi adalah penyesuaian produk global dengan karakter pasar (lokal). Jadi, glocalisasi menjadi strategi yang muncul sebagai kritik

terhadap konsep perdagangan bebas neoklasik, yang tidak lagi menspesialisasikan sebuah negara dalam satu produk sesuai dengan potensinya. Karena itu, para produsen mengkondisikan sebuah negara (pasar) agar berada dalam satu latar belakang sosial-budaya yang sama dengan negara yang lain.

Secara konseptual, glocalisasi tidak sekedar berbicara tentang kemandirian dari sebagian komunitas lokal (seperti halnya konsep *localism*) ataupun pembentukan kemitraan dan jejaring kerja yang menghubungkan sejumlah subyek lokal (seperti halnya konsep *multi-localism*). Glocalisasi didasarkan pada serangkaian tindakan dari beragam aktor lokal yang saling terkait dalam jejaring kerja, dalam upaya berinteraksi dengan para aktor global. Dengan demikian, secara sederhana, glocalisasi menunjuk pada strategi untuk melakukan pembaharuan substantif dalam beragam aspek globalisasi dengan tujuan menciptakan hubungan antara manfaat globalisasi (teknologi, informasi, dan ekonomi) dengan kondisi-kondisi lokal, dan pada saat yang sama, berupaya mewujudkan pendekatan *bottom-up* bagi pengelolaan proses globalisasi, dengan berdasarkan pada pemerataan distribusi sumberdaya-sumberdaya serta pada revitalisasi nilai-nilai sosial dan budaya setempat⁷.

Glocalisasi menjadi strategi untuk memadukan antara para “pemain” global dengan kondisi lokal agar tercapai kesesuaian dengan keperluan komunitas lokal. Glocalisasi memfasilitasi pemberdayaan komunitas-komunitas lokal agar mampu mengarahkan dampak globalisasi bagi keuntungan mereka sekaligus menghubungkannya dengan sumberdaya-sumberdaya global.

⁷ CERFE. 2003. *Glocalization : Research Study and Policy Recommendations*. Rome : The Glocal Forum, CERFE Group, dan World Bank Institute, hlm. 14.

Untuk mengoperasionalkan gagasan glocalisasi, prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah adanya pengakuan penuh terhadap eksistensi dan potensi para aktor di level lokal, tanpa harus dibatasi pada lokalitasnya. Artinya, keberadaan para aktor lokal ini jangan hanya dipandang pengaruhnya sebatas wilayah atau daerah di mana mereka bermukim, tapi juga kapasitasnya untuk membangun jejaring kerja dengan para aktor lain di level yang berbeda, baik di level nasional, supranasional, bahkan global. Dalam kerangka berpikir inilah, politik desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sarana untuk memberikan peluang partisipasi yang lebih besar bagi para aktor lokal untuk menentukan arah pembangunan daerahnya karena merekalah yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan daerahnya, serta solusi terbaik yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di level yang paling bawah.

Menemukan Kembali (*Reinventing*) Nilai-nilai Sunda

Ditinjau dari kuantitasnya, etnis Sunda merupakan etnis kedua terbesar setelah etnis Jawa. Meski demikian, tidak banyak catatan atau tulisan yang dibuat tentang etnis Sunda, sehingga gambaran tentang manusia Sunda dan kehidupannya belum banyak terungkap secara mendalam. Beberapa tulisan yang membahas tentang dinamika kehidupan sosial-budaya manusia Sunda umumnya berangkat dari masa setelah masuknya Islam ke tatar Sunda. Demikian pula gambaran dinamika kehidupan politik dan pemerintahan di tatar Sunda umumnya lebih banyak terungkap dari catatan sejarah pada masa pembukaan hutan dan tanam paksa (1750-1870-an), meski memang terdapat beberapa tulisan yang juga membahas pola kehidupan masyarakat Sunda pada masa kerajaan-kerajaan Hindu tapi jumlahnya tidak terlampau banyak.

Terbatasnya catatan sejarah tentang kehidupan manusia Sunda kemungkinan disebabkan pola hidupnya yang tidak pernah membentuk suatu tipe komunitas desa dan tidak pernah dikuasai oleh satu kekuasaan politik kerajaan yang terpusat.⁸ Tidak seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, penguasa di tatar Sunda tidak pernah mendirikan satu kerajaan Sunda yang menyatu. Kerajaan Sunda terakhir, Pajajaran, menguasai Priangan pada abad ke-15 dan ke-17 hanya merupakan kerajaan simbolik di suatu lingkup wilayah yang luas.

Negara-negara kerajaan di sekitarnya merupakan negara-negara otonom yang dipimpin oleh para bangsawan setempat (*menak*) sebagai kepala wilayah yang mandiri.⁹ Pola seperti ini biasa dinamakan juga sebagai pola mandala. Satu mandala merupakan suatu kesatuan masyarakat dengan penguasa yang relatif otonom. Lebih lanjut Sutherland melukiskan hubungan bangsawan dan masyarakat yang cenderung bersifat feodal. Para *menak* tersebut merupakan bangsawan keturunan dengan berbagai hak istimewa, gelar keningratan, dan jabatan resmi. Mereka tinggal di kota-kota dan tidak banyak membina hubungan dengan wilayah pedesaan. Walaupun sebagian dari mereka memiliki tanah pertanian di desa, hubungan antara bangsawan dengan para petani sering terbatas pada pengerahan tenaga kerja setengah paksa dan penarikan bagi hasil panen.

Pola relasi kekuasaan di tatar Sunda mengalami dinamika yang cukup menarik untuk dicermati. Pada masa awal pembukaan hutan, tatar Sunda merupakan wilayah yang tertutup dan semi otonom tanpa ada penguasa pusat yang berkuasa menarik pajak dan mendapat dukungan rakyat¹⁰. Pertanian ladang (*huma* atau *gaga*) tidak memungkinkan pertumbuhan penduduk yang besar. Kampung-kampung umumnya berukuran kecil dan

⁸ Hans Antlöv. *Negara dalam Desa*. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2003.

⁹ Heather Sutherland. "The Priyayi" dalam *Indonesia*, No. 19, April 1975.

¹⁰ Antlöv, *op.cit.*, hal. 27.

jarang terintegrasi ke dalam sistem desa yang lebih besar. Kampung-kampung kecil tersebut terdiri dari rumah tangga para petani ladang yang hidup terutama dari apa yang mereka hasilkan sendiri.

Namun, kondisi ini berubah setelah penaklukan Belanda pada tahun 1677 dan era Tanam Paksa (1750-1870). Hubungan kekuasaan yang berlangsung lebih mencerminkan kondisi yang otoriter daripada moralistik, lebih bersifat administratif daripada komunal, dan didasarkan pada hubungan dengan penguasa yang lebih tinggi bukannya pada dukungan dari penduduk. Pada pertengahan abad ke-19, lahan-lahan perladangan berubah menjadi lahan padi sawah irigasi. Perubahan pola produksi ini kemudian mengarah pada perubahan struktur sosial. Penduduk tatar Sunda pada masa tersebut menjadi masyarakat yang terstratifikasi dan berlapis berdasarkan pada kepemilikan tanah. Pada masa inilah, kekuasaan para *menak* lokal menjadi semakin besar.

Peran penting kaum *menak* dalam dinamika politik lokal pun mengalami pasang-surut sejalan dengan terjadinya berbagai perubahan. Ketika Islam mulai berkembang, muncul aktor baru dalam dinamika politik lokal, yakni kaum ulama. Kaum ulama memainkan peran penting di wilayah Jawa Barat khususnya selama periode 1800-1870 karena terdapat hubungan yang erat antara kehidupan agama dengan kehidupan material.¹¹ Di samping mengurus kepentingan spiritual masyarakat, para pemimpin agama juga memegang kuasa atas irigasi dan pertanian. Ketika kampung-kampung kecil tumbuh menjadi desa dan pertentangan lokal berkembang menjadi politik resmi, maka para pemimpin agama sering bekerja sama dengan birokrasi dalam satu jaringan ekonomi dan hak-hak istimewa yang kompleks.

¹¹ Ensering sebagaimana dikutip Antlöv, *loc.cit.*

Relasi pemimpin agama dengan birokrasi yang cenderung elitis kemudian menimbulkan perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat, seperti yang terjadi di Banten dan tempat-tempat lain di Priangan.¹² Di kalangan petani Sunda, ketidakpuasan mereka diarahkan kepada penguasa kolonial, para bangsawan pribumi dan pejabat desa, serta para guru agama. Pada masa-masa berikutnya, gerakan-gerakan ini dipimpin oleh kelompok-kelompok Islam progresif. Selama 40 tahun berikutnya berlangsunglah suatu gerakan politik yang meluas dengan pembaharuan Islam sebagai garda depannya.

Pada akhir abad ke-19, kebanyakan pemimpin agama dan politik lokal di Priangan mulai mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan penduduk desa. Gerakan-gerakan protes sosial dan pembaharuan Islam mendorong mereka untuk lebih berorientasi pada masyarakat. Abad ke-20 membawa tatanan politis dan kepemimpinan politik baru, khususnya setelah Indonesia merdeka.

Gerakan-gerakan sosial di tatar Sunda masih tetap bermunculan pascakemerdekaan Indonesia, khususnya yang timbul sebagai respon ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat. Salahsatu contohnya adalah gerakan Darul Islam yang muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap tidak terakomodasinya tuntutan dimasukkannya Syariat Islam ke dalam dasar negara. Pada tahun-tahun awal gerakan ini, para guru agama mengajukan gagasan perjuangan damai untuk mencapai negara Islam. Orang bergabung dengan Darul Islam karena ingin mereformasi sistem pemerintahan lewat jalur politik. Namun, konfrontasi dengan gerakan nasionalis membawa Darul Islam pada proses radikalisasi dan pemberontakan bersenjata,

¹² Sartono Kartodirdjo. 1973. *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Singapura : Oxford University.

sehingga akhirnya gerakan ini kemudian dianggap sebagai gerakan pemberontakan dan berhadapan dengan Pasukan Siliwangi.

Era kebangkitan partai-partai politik pada masa demokrasi liberal membawa serta politik aliran ke dalam peta politik di tatar Sunda. Ada dimensi lain dalam aliran Islam, yakni tradisionalisme dan reformisme. Konflik ideologi ini pernah berlangsung pada perebutan gerakan Sarekat Islam pada dekade 1910-an dan sekali lagi pada masa pemberontakan Darul Islam. Hasilnya adalah meningkatnya polarisasi politik yang melintasi perbedaan-perbedaan kelas. Namun, fenomena ini tidak terlampaui menguat karena norma dasar kehidupan masyarakat Sunda adalah harmoni, bukan ketidakpatuhan dan revolusi. Sedikit banyak norma dasar ini turut mempengaruhi berjalannya dinamika politik di wilayah Sunda hingga saat ini.

Pada masa sekarang, terdapat beberapa nilai atau norma yang berkembang di masyarakat Sunda yang mungkin dapat dikategorikan sebagai pandangan mereka terhadap masalah politik dan pemerintahan. Nilai-nilai budaya lokal banyak mengandung muatan moralitas meski tidak dinyatakan secara eksplisit. Moralitas tersebut tidak hanya tergambar dari relasi sosial antarmanusia, antarelit dan massa, tapi juga antara manusia dengan lingkungan alamnya. Sistem nilai budaya Sunda mengenal adanya “ramalan” atau *uga*¹³ sebagai salahsatu media transfer nilai-nilai budaya antargenerasi. Interpretasi simbolik terhadap *uga* mengungkapkan bahwa perubahan sosial atau politik pada masa

¹³ Uga dikenal di kalangan masyarakat agraris-tradisional sebagai ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memahami tanda-tanda zaman sehingga seringkali dianggap sebagai ramalan, seperti halnya ramalan Joyoboyo (Nina Lubis, 2002, *Sejarah dan Budaya Politik*. Bandung : Satya Historika, hal. 230). Uga Kawasen dari daerah Ciamis berbunyi : *ari nu bakal jadi ratu, baju butut babadong batok, banderana karakas cau* (artinya yang akan menjadi ratu/penguasa, berbaju rombeng, menggunakan topi tempurung, dan berbendera daun pisang kering).

yang akan datang terjadi sesuai dengan yang telah diperkirakan oleh para leluhur¹⁴. Artinya, perubahan zaman berikut tantangannya sesungguhnya telah diperkirakan sebelumnya, perubahan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, sebagai bekal untuk menghadapi tantangan perubahan zaman, maka nilai-nilai budaya lokal hendaknya menjadi acuan moral (*moral guidance*) dalam sikap hidup sehari-hari.

Nilai-nilai tersebut dapat berbentuk semboyan, nasehat, atau peribahasa yang berkembang dari mulut ke mulut, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung dijadikan semacam pedoman atau ukuran dalam menilai suatu tindakan atau perbuatan masyarakat maupun elit penguasa. Adapun nasehat atau peribahasa yang berdimensi politik tersebut, antara lain¹⁵ *cageur, bageur, bener, pinter, siger tengah, leuleus jeujeur liat tali, laukna beunang caina herang, bengkung ngariung bongkok ngaronyok, tiis ceuli herang panon, landung kandungan laer aisan, pindah cai pindah tampian, kawas kujang dua pangadekna, legok tapak genteng kadek*, dll.

Selain tercermin dalam ungkapan-ungkapan, nilai-nilai *local governance* di Tatar Sunda juga tercermin dalam pola kepemimpinan Sunda sebagaimana termuat dalam naskah-naskah kuno dan tradisi lisan di kalangan masyarakat Sunda. Gagasan tipe kepemimpinan administrator terdapat dalam naskah Siksakandang Karesian pada lembaran 26 dan 27¹⁶. Dalam lembaran tersebut, berisi suatu ajaran bahwa apabila tiap orang berpedoman pada kebenaran dan menjalankan tugas masing-masing dengan sungguh-sungguh maka akan tercipta kesejahteraan yang abadi. Demikian pula dalam

¹⁴ Kusnaka Adimihardja. 1999. "Kebudayaan Sunda dalam Cakrawala Politik Kebudayaan Indonesia". Dalam *Jurnal Budaya Dangiang*, edisi I/Mei-Juli 1999.

¹⁵ Utang Suwaryo. "Perspektif Kebudayaan Sunda terhadap Politik". Makalah disampaikan dalam *Lokakarya Daerah Pembangunan Berwawasan Budaya Koordinator Daerah Jawa Barat*, Bandung, 31 Januari 2004.

¹⁶ Kusnaka Adimihardja, 1986, *Kepemimpinan dalam Kebudayaan Sunda*. Makalah. Depdikbud, hal. 231.

Prasasti Kawali I dan II, Raja Wastu berwasiat pada para penerusnya agar negara Kawali tetap sejahtera dengan melakukan kebajikan dan memelihara kesejahteraan.

Berdasarkan kedua sumber tertulis ini, nilai-nilai kepemimpinan yang melekat dalam budaya Sunda adalah berpedoman pada kebenaran, bekerja sesuai dengan tugasnya, melakukan kebajikan, dan memelihara kesejahteraan. Dalam penjabaran selanjutnya, nilai-nilai ini dinyatakan dalam sikap-sikap seorang pemimpin yang :

1. *teu adigung kamagungan* (tidak sombong);
2. *titih-rintih, tara kajurung ku nafsu* (tertib, tidak pernah terdorong nafsu);
3. *sacangreud pageuh, sagolek pangkek, henteu ganti pileumpangan* (kukuh pendirian);
4. *leber wawanen* (penuh keberanian) yang diimbangi dengan kepandaian;
5. *loba socana rimbil cepilna* (pandai membaca keadaan dan mendengar keluh kesah rakyatnya);
6. *kudu boga pikir rangkepan* (waspada);
7. *kudu jadi gunung pananggeuhan* (harus menjadi andalan bagi rakyat).¹⁷

Dalam berbagai jenis tradisi lisan di kalangan masyarakat Sunda, juga tersirat mengenai gambaran ideal figur seorang pemimpin. Meskipun daerah Sunda merupakan bekas daerah kerajaan, namun gambaran tentang figur pemimpin yang ideal jauh dari sosok yang feodal ataupun sarat dengan unsur kekuasaan seperti kekayaan. Dalam Wangsit Siliwangi, misalnya, figur seorang pemimpin diidentifikasi sebagai gembala (*budak angon*)¹⁸. Demikian pula, dalam *uga* (ramalan) Kawasen dinyatakan bahwa seorang pemimpin adalah figur yang sangat sederhana dan merakyat.

¹⁷ Nina H. Lubis, 2002, *Sejarah dan Budaya Politik*. Bandung : Satya Historika, hal. 227 – 228.

¹⁸ Adimihardja, *Op.Cit*, hal. 232

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah masuknya agama Islam ke daerah Sunda melalui Banten dan Cirebon, nilai-nilai kepemimpinan Sunda mulai dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Karena itu, muncullah figur ideal pemimpin yang dikenal dengan sebutan *Raja Pinandita*¹⁹ yang merupakan perpaduan antara pejabat negara (umaro) dan ulama (maksudnya memiliki pengetahuan dan penghayatan yang memadai mengenai keagamaan).

Kesederhaan konsep kepemimpinan dan figur pemimpin dalam nilai-nilai adat Sunda ini bersumber dari pandangan hidup orang Sunda yang berusaha mengambil jalan tengah (*sineger tengah*)²⁰, yang diartikan sebagai tingkah laku atau tindakan yang seimbang dan berkecukupan, tidak kekurangan ataupun tidak berlebihan. Pandangan ini bisa mengandung aspek positif sekaligus aspek negatif. Positifnya, pandangan hidup ini menyebabkan orang Sunda tidak menonjolkan diri, tapi negatifnya, sikap seperti ini dapat diartikan sebagai orang yang tidak berani mengambil resiko dalam mempertahankan sesuatu.

Keseluruhan nasehat tersebut mengandung makna nilai yang menyangkut perilaku manusia Sunda dalam menghadapi perubahan, syarat-syarat menjadi pemimpin, cara menghadapi masalah, serta sikap terhadap perbedaan pendapat dan konflik. Dengan demikian, dalam berperilaku, nilai-nilai inilah yang menjadi acuan untuk mencapai kondisi yang seimbang (harmonis). Misalnya, dalam menghadapi konflik, situasi kondisi yang ingin dituju oleh masyarakat Sunda adalah *tiis ceuli herang panon* (aman tentram). Oleh karena itu, setiap masalah harus dihadapi dengan *landung kandungan laer aisan*

¹⁹ Atang Ruswita, *Kuda Belang*. Artikel dalam *Pikiran Rakyat*, 1 Agustus 2002.

²⁰ Lubis, *Op.Cit*, hal. 216

(bijaksana). Menghadapi perbedaan pendapat atau konflik dengan *leuleus jeujeur liat tali*. Artinya, dihadapi dengan lemah lembut, tapi tidak mengabaikan prinsip yang dianut.

Sejalan dengan perkembangan masa sekarang yang memunculkan berbagai kekuatan politik, sosial, dan budaya baru, norma harmonisasi tampaknya perlu dimaknai ulang. Harmonisasi dalam konteks sentralisasi bisa jadi akan memunculkan kondisi yang serba tertutup dan saling curiga di antara para pelaku politik. Karena itu, harmonisasi harus dimaknai sebagai penciptaan konsensus melalui proses yang transaksional. Budaya lisan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Sunda sebenarnya dapat menjadi modal untuk membangun diskursus yang egalitarian di antara berbagai kekuatan politik yang ada di tatar Sunda, baik kekuatan politik formal maupun nonformal.

Adaptasi Nilai-nilai Sunda bagi Pengembangan *Local Good Governance* di Jawa Barat

Jawa Barat masa kini bukan lagi tatar Sunda yang hanya dihuni orang Sunda *pituin*. Demikian pula, konteks relasi kekuasaan yang berlangsung sekarang tidak dapat disamakan lagi dengan konteks yang berlangsung berabad-abad sebelumnya. Jawa Barat masa kini tidak dapat disamakan dengan Pajajaran di masa lampau karena konteks dan tantangan yang dihadapinya berbeda. Oleh karena itu, nilai-nilai Sunda yang menjadi semangat pada masa kejayaan Pajajaran perlu direvitalisasi dan diadaptasi agar mampu menjawab tantangan zaman.

Konsep revitalisasi tidak hanya berbicara upaya memulihkan kembali nilai-nilai Sunda, tapi juga memaknai ulang substansi yang terkandung di dalamnya, sehingga kebangkitan kembali nilai-nilai Sunda tidak sebatas ritual. Pemulihan nilai-nilai budaya

Sunda yang egalitarian hendaknya tidak sekedar berhenti pada romantisme historis akan kejayaan Pajajaran atau kepemimpinan Prabu Siliwangi, tapi perlu dilanjutkan dengan upaya untuk mengadaptasikannya dengan kondisi sekarang. Upaya revitalisasi baru akan bermakna manakala upaya tersebut diimbangi dengan adaptasi (penyesuaian) nilai dengan institusi dan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia pada masa sekarang.

Local good governance menyangkut konsepsi mengenai praktik relasi kekuasaan yang didasari oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti keterbukaan, partisipasi, pertanggungjawaban, penegakan hukum, kemitraan yang sinergis, pengembangan jejaring kerja, dll. Kesemuanya merupakan refleksi dari pola relasi kekuasaan khas Sunda yang tidak mengenal adanya kekuasaan yang memusat. Nilai kesetaraan dan pola kepemimpinan yang egalitarian perlu menjadi titik fokus yang perlu direvitalisasi dalam merancang ulang praktik tata pemerintahan lokal yang baik di Jawa Barat.

Seiring dengan perkembangan zaman, keanekaragaman masyarakat Jawa Barat semakin bertambah, tidak hanya dari dimensi kultural namun juga dimensi identitas (ras, etnisitas, agama). Dalam kondisi seperti inilah konsep multikulturalisme memperoleh relevansinya. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ide multikulturalisme pada dasarnya adalah gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri.

Komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri masyarakat Jawa Barat dewasa ini tidaklah berarti terjadinya ketercerabutan dari akar budaya lokal (Sunda) karena pada saat yang sama sesungguhnya juga terdapat simbol-simbol, nilai-nilai, struktur-struktur, dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tersebut. Dalam karakter masyarakat yang mengarah pada kosmopolitanisme, multikulturalisme menjadikan pola interaksi dan identifikasi diri menjadi bersifat multi sehingga seseorang tidak hanya merasa diri sebagai orang Sunda karena dia dilahirkan dari orang tua beretnis Sunda, tapi lebih dari itu, seorang yang bukan etnis Sunda tapi lahir di Bandung pun bisa merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Sunda.

Karakter budaya politik Sunda cenderung menempatkan elit secara dominan dalam pengambilan keputusan, sementara karakter masyarakat Sunda kendati menunjukkan ciri masyarakat yang egaliter (sederajat), namun secara kultural masyarakat Sunda cenderung menunjukkan partisipasi politik yang individualistis²¹. Kondisi ini memberi peluang kepada pemegang otoritas politik untuk tidak memedulikan kepentingan politik mayoritas masyarakat. Dalam batas tertentu, masyarakat Sunda memang memperlihatkan ciri egaliter tetapi dalam egaliterianisme ini justru muncul sifat-sifat individualistis dalam persoalan yang menyangkut kepentingan pribadi. Dalam kondisi demikian, apatisme atau ketidakacuhan politik kerap tampak ke permukaan. Kondisi ini semakin memperlebar peluang pemegang otoritas politik untuk mengesampingkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Perilaku politik mereka akhirnya juga bercirikan individualistis sebab tidak ada *pressure* signifikan secara kolektif dari masyarakat ketika kepentingan mereka tidak terakomodasi sepenuhnya.

²¹ Budi Radjab dalam *Pikiran Rakyat*, 11 Juni 2003.

Karena itu, upaya revitalisasi ini juga tidak akan bermakna tanpa diimbangi oleh advokasi baik secara langsung maupun melalui berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kapasitas nilai-nilai budaya Sunda. Langkah ini bisa dilakukan pemerintah daerah bersama elemen-elemen masyarakat sipil (LSM maupun lembaga adat) yang bergerak sesuai dengan koridor perannya masing-masing. Peran pemerintah daerah didasarkan pada prinsip *subsidiarity*, dalam arti bahwa pemerintah daerah hanya melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Intensitas intervensi pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tantangan dan masalah yang dihadapi. Ketika kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah sangat rendah dan berpotensi untuk menuju konflik maka intensitas intervensi pemerintah daerah harus cukup besar. Akan tetapi, manakala kapasitas masyarakat cukup tinggi, maka peran pemerintah daerah adalah intervensi minimal. Dengan demikian, peran pemerintah daerah lebih banyak ditujukan untuk mengisi kesenjangan antara masalah yang dihadapi masyarakat lokal dan kapasitas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Relasi yang seimbang dan partisipasi masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan menjadi penting untuk menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dan pelibatan masyarakat sipil (*civic engagement*) yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kapasitas nilai-nilai Sunda sebagai landasan bagi terwujudnya *local good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 1986. *Kepemimpinan dalam Kebudayaan Sunda*. Makalah. Jakarta : Depdikbud.
- _____. 1999. “Kebudayaan Sunda dalam Cakrawala Politik Kebudayaan Indonesia”. Dalam *Jurnal Budaya Dangi*, edisi I/Mei-Juli 1999, Bandung : Komunitas Dangi Bandung, Yayasan Paguyuban Pangarang Sastra Sunda Bandung, dan Yayasan Kebudayaan RANCAGE.
- Antlöv, Hans. 2001. *Negara dalam Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- CERFE. 2003. *Glocalization : Research Study and Policy Recommendations*. Rome : The Glocal Forum, CERFE Group, dan World Bank Institute.
- Clark, Ian. 1997. *Globalization and Fragmentation : International Relations in the Twentieth Century*. Oxford & London : Oxford University Press.
- Dogan, Hasan Zafer. 1989. “Form of Adjustment : Sociocultural Impacts of Tourism”, *Annual of Tourism Research* Volume 16.
- Lindsey, Lawrence B. 1998. “The Real Economic Globalist” dalam *Far Eastern Economic Review*.
- Lubis, Nina H. 2002. *Sejarah dan Budaya Politik*. Bandung : Satya Historika.
- Panggabean, Samsurizal. 1991. “Tantangan-tantangan Globalisasi”. *Perspektif*, Nomor 1, Volume 3.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 1996. “Konflik Antar Etnis dalam Masyarakat Global dan Relevansinya bagi Indonesia”. *Analisis CSIS*, No. 2.
- Ruswita, Atang. 2002. *Kuda Belang*. Artikel dalam *Pikiran Rakyat*, 1 Agustus.
- Scholte, Jan Aart. 2000. *Globalization : A Critical Introduction*. New York : Palgrave.
- Triyono, Lambang. 1996. “Globalisasi Modernitas dan Krisis Negara Bangsa : Tantangan Integrasi Nasional dalam Konteks Global”, *Analisis CSIS*, Nomor 2.